

**HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Diajukan oleh :

QOMARIYATUZ ZUHRIYAH

F 100 050 118

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang dapat memadukan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan psikisnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Madonat, 2008)

Seberapa besar kontribusi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat diketahui dari keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai proses belajar yang terencana, teratur, terawasi dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab serta memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, Sumanteri (Ika, 2005).

Sekolah menengah adalah lembaga-lembaga pendidikan yang mulai mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Statistik BPS menunjukkan bahwa pengangguran terbuka semakin lama semakin membesar bagi tamatan sekolah menengah. Hal ini menunjukkan perlunya suatu pembenahan khusus sekolah menengah. Hal ini berarti pula program-program pelatihan sesudah pendidikan dasar haruslah diperkuat dan diperbanyak serta bervariasi untuk menampung jumlah pendidikan dasar (Tilaar, 2001).

Di tingkat sekolah menengah, selain Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sekolah-sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga menengah terampil. Salah satu sekolah kejuruan tersebut adalah Sekolah Teknik Menengah (STM) yang sekarang namanya diganti dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (<http://forum.kompas.com>). Dimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan sederajat atau pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs (<http://id.wikipedia.org>).

Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anak Indonesia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara formal. Jenjang ini merupakan tahap yang strategis dan kritis bagi perkembangan dan masa depan anak Indonesia. Pada jenjang ini, anak Indonesia berada pada pintu gerbang untuk memasuki dunia pendidikan tinggi yang merupakan wahana untuk membentuk integritas profesi yang didambakannya. Pada tahap ini pula,

anak Indonesia bersiap untuk memasuki dunia kerja yang penuh tantangan dan kompetisi. Sehingga pendidikan merupakan suatu kunci yang menjadi elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat jika memang taruhannya adalah perkembangan dan kemajuan bangsa. Namun timbul persoalan karena kenyataannya pendidikan bukan suatu yang bebas nilai dalam dirinya. Pendidikan adalah suatu produk dan konstruksi sosial, dan celaknya terdapat jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan akibat dari konstruksi tersebut.

Kesenjangan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan gender secara menyeluruh. Dengan lebih rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar. Dengan demikian kesempatan pendidikan untuk semua harus dibuka seluas-luasnya dengan memajukan program-program sosialisasi kesetaraan gender, agar masalah kesenjangan gender tidak terus berlangsung. Kesetaraan gender tidak seyogyanya diartikan bahwa perempuan berjuang untuk menjadi pesaing bagi laki-laki dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, tetapi harus dianggap sebagai mitra sejajar. Kesetaraan gender di bidang pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan dalam pembangunan sektoral serta peningkatan produktifitas masyarakat.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 1999, penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% bahkan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki lulusan SD sebesar 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan Sekolah Menengah

yaitu 11,4% atau lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 157%. Sementara itu, penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah mencapai 2,1% yang masih lebih rendah dari penduduk laki-laki yang berpendidikan sarjana 3,2%. Menurut Ace Suryadi (2004) kesetaraan gender dapat memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik. Selain itu juga memberikan masukan dalam upaya memperkecil kesenjangan gender pada proses penjurusan, bidang keahlian atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jurusan atau program keahlian pada semua jenjang pendidikan, khususnya untuk program-program keahlian atau jurusan yang biasanya untuk laki-laki, melalui perbaikan dalam system penerimaan siswa/mahasiswa baru dalam penjurusan, sehingga dapat menyeimbangkan proporsi siswa / mahasiswa menurut gender. Seperti yang tertuang dalam The Beijing Declaration and The Platform for Action, 1996 (Gender Education and Deelopment, International Center of the ILO). “Pendidikan merupakan hak asasi manusia, perkembangan dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan meguntungkan, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang pada akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dewasa”. (Wahyuni, 2007)

Dalam lima tahun terakhir semakin banyak perempuan yang bisa mengakses jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Berdasarkan Laporan Pencapaian Millenium Development Goals (MDG) Indonesia Tahun 2007, angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki cenderung meningkat. Menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan millenium. Jika pada periode sebelumnya (1992-2002), rasio APM SMA/MA perempuan rata-rata hanya 98,76% pertahun maka pada periode 2002-2006 rasio APM meningkat menjadi rata-rata 99,07 pertahun. Pada jenjang perguruan tinggi juga mengalami kecenderungan yang sama, rasio APM Perguruan tinggi meningkat dari rata-rata 85,73% (1992-2002) menjadi 97,24% (2003-2006).

Walaupun angka partisipasi hampir sebanding, ketidaksetaraan gender justru nampak pada pemilihan jurusan di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, dimana pemilihan jurusan pada perempuan dikaitkan dengan fungsi domestiknya. Misalnya dalam pemilihan jurusan ditingkat sekolah lanjutan (Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK), perempuan lebih mendominasi bidang-bidang ilmu sosial seperti bisnis manajemen dan pariwisata, sedangkan laki-laki lebih banyak memilih bidang ilmu teknis. Perempuan tidak sesuai dengan bidang ilmu teknis karena program studi tersebut membutuhkan fisik yang kuat, intelektualitas yang tinggi dan peluang kerja lebih membuka kesempatan pada laki-laki (<http://web.g-help.or.id>).

Untuk dapat menyetarakan peran gender yang ada maka dunia akademis harus memandang kesetaraan gender sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan sehingga akan tercipta kesetaraan gender yang sebenarnya sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam pendidikan dipandang sangat penting karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan asumsi bahwa tidak ada bias gender dalam kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, artinya kesempatan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan sangat terbuka seluas-luasnya dengan peluang yang sama. Karena itu, kesempatan berpendidikan yang lebih luas pada setiap jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender harus segera diwujudkan. Perempuan juga harus diberdayakan potensinya baik sebagai pengembangan kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik. Untuk mengarah pada keahlian profesionalisme ketimpangan gender juga harus diperkecil pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kesadaran gender dalam peran-peran gender yang lebih seimbang dalam proses pendidikan di sekolah. Peningkatan kesadaran gender terhadap masyarakat bahwa kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan pekerjaan menurut gender dapat memacu produktivitas masyarakat. Keseimbangan jumlah peserta didik perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan dalam memilih jurusan hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Disamping itu dukungan sosial yang biasa diperoleh dari

keluarga, teman ataupun orang yang berada disekitarnya juga sangat dibutuhkan untuk tercapainya peningkatan kesetaraan gender. Karena dukungan sosial merupakan suatu bentuk kepedulian sosial kepada orang lain sehingga orang tersebut merasa dicintai, diperhatikan dan merasa aman karena mendapatkan nasehat ataupun petunjuk sehingga dapat berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

Sejalan dengan hal-hal yang diuraikan, terjadi fenomena yang saling berhubungan antara dukungan sosial dengan pengambilan keputusan yang akan memunculkan kecenderungan mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan. dimana seseorang yang memiliki dukungan dalam lingkungan sosialnya maka orang tersebut juga akan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, muncul pertanyaan apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan pengambilan keputusan? Untuk itu peneliti mengambil judul:

“Hubungan antara dukungan sosial dengan pengambilan keputusan”

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan dukungan sosial dengan pengambilan keputusan.
2. Mengetahui tingkat dukungan sosial.
3. Mengetahui tingkat pengambilan keputusan.

4. Memgetahui sumbangan efekif dukungan sosial dalam pengambilan keputusan pada subyek penelitian.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan sumbangan bagi ilmuwan psikologi sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang psikologi sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk dapat melakukan perubahan menuju tujuan yang ingin dicapai.
- b. Bagi orang tua subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar tingkat dukungan sosial yang diberikan kepada subjek.